

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dianggap sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka untuk menyusun penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judu Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
	Aldy V. J Ratulangi1, Sifrid Pangemanan, Victorina Tirayoh (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Biaya Operasional Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado.	Kualitatif	Rumah Sakit ini telah menerapkan akuntansi manajemen lingkungannya dan Biaya – biaya lingkungan tersebut di masukkan pada biaya belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Rumah Sakit ini pun sudah melakukan proses yang seharusnya yaitu: Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan, Penyajian, dan juga Pengungkapan. Dan juga sudah melakukan pengelolaan limbah dengan baik.
	Aminah, Noviani	Analisis Penerapan Akuntansi	Kualitatif	RS Mardi Waluyo melakukan antisipasi

Dilanjutkan . . .

	(2014)	Lingkungan di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro		<p>pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Unit Sanitasi Lingkungan dengan melakukan pengolahan limbah dan mengurangi debit limbah yang dihasilkan oleh perusahaan.</p> <p>Serta mencatat biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh unit tersebut dalam pengelolaan limbah.</p>
	Ni Made Indrawati, Iga Intan Saputra Rini (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan	Kualitatif	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan telah pengolahan limbah padat dan cair dengan menggunakan</p>

				<p>incinerator dan IPAL. Namun Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan belum menerapkan akuntansi lingkungan. Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan mengidentifikasi biaya lingkungan sebagai belanja langsung dan belanja tidak langsung.</p>
	Fika Erisya Islamey (2016)	Perlakuan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Paru Jember	Kualitatif	<p>Hasilnya ialah bahwa biaya-biaya atas pengolahan limbah rumah sakit pada paru jember terdiri atas beberapa biaya yaitu: biaya pengadaan, biaya</p>

				<p>pemeliharaan, biaya bahan habis pakai, biaya pemeriksaan, dan biaya pengangkutan. Rumah sakit juga telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi atas pengelolaan limbah yang telah dilakukan.</p>
	<p>Marisya Mahdia Khoirina (2016)</p>	<p><i>Analysis Of Green Accounting To Support Corporate Sosial Responsibility (Case Study : Semen Gersik Hospital)</i></p>	<p>Kualitatif</p>	<p><i>The research results revealed that Semen Gresik Hospital has not implemented the concept of green accounting yet. This can be seen in the identification of costs, there is no aspect of measurement and clear classification how a costs is</i></p>

Dilanjutkan . .

				<i>categorized as environmental costs or not. The results also showed that the Semen Gresik Hospital had not made the environmental financial report.</i>
--	--	--	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah. Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah tema yang penelitiannya yaitu analisis akuntansi lingkungan dalam pengolahan limbah pada suatu entitas. Dari penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda - beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aldi v, bahwa rumah sakit pancaran kasih manado sudah menerapkan akuntansi lingkungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ni made indrawati, iga intan saputra rini di RSUD tabanan dan Marisyah mahdiah di Rumah Sakit Semen Gresik itu belum menerapkan akuntansi lingkungan. Ada pun penelitian yang dilakukan Aminah, Noviani di RS Mardi Waluyo dan Fika Erisya di RS Paru Jember belum menerapkan akuntansi lingkungan namun sudah melakukan pencatatan mengenai biaya-biaya untuk pengolahan limbah.

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut yaitu:

1. Periode pengamatan yang dilakukan adalah tahun periode 2019

2. Objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Baturetno Wonogiri.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batas-batas dan norma masyarakat (Ratnasari, 2011). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan perusahaan harus memiliki nilai-nilai sosial yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Ketika nilai-nilai yang dianut perusahaan berbeda dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam.

Legitimasi teori merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. Perusahaan bisa ada dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari masyarakat, oleh sebab itu perilaku perusahaan dan cara yang digunakan perusahaan saat menjalankan bisnis harus berada dalam bingkai pedoman yang ditetapkan masyarakat (Wardani, 2013).

Legitimasi Organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan (Nur, 2012). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa legitimasi berisi tentang hal-hal yang bermanfaat bagi

perusahaan untuk keberlangsungan hidup perusahaan yang dapat dilihat dari kinerja perusahaan itu sendiri.

Legitimasi teori menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Legitimasi dianggap sebagai asumsi bahwa tindakan yang dilakukan suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan sistem, norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Rustiarini, 2011).

2.2.2 Teori Stakeholder

Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya Perusahaan adalah bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial.

Kondisi tersebut menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara perusahaan dan para stakeholder. Hal ini berarti perusahaan harus melaksanakan peranannya secara dua arah yaitu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri maupun stakeholders. Stakeholders merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. (Juliana, 2018)

2.2.3 Akuntansi Lingkungan

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing ahli yang memberikan definisi atas akuntansi. Secara umum akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomis. Pengertian ini menekankan pada peranan akuntansi, yaitu untuk memberikan informasi bagi kepentingan para pemakai daftar keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.. Pengertian akuntansi tersebut merupakan akuntansi oleh *Financial Accounting Standard Board (FASB)*. *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* melalui *Committee on Terminology (1941)* yang diterjemahkan oleh Hadibroto mendefinisikan akuntansi adalah suatu keahlian untuk mencatat, mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan dengan cara yang tepat dan dinyatakan dengan uang, transaksi dan kejadian yang sebagian sekurang-kurangnya bersifat keuangan dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh. (Renaldo, 2012)

2. Pengertian Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting* atau *EA*) merupakan istilah berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental cost*) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan. Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut.. (Indrawati, 2018)

Dari pendapat yang lain Akuntansi lingkungan adalah identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada stockholders perusahaan Akuntansi lingkungan

(Environmental Accounting) adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak (*impact*) baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. (Aldy, 2018)

3. Tujuan Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan atau "*environmental accounting*" adalah istilah umum yang bersangkutan dengan biaya lingkungan terhadap setiap praktek akuntansi baik di lembaga pemerintah maupun di perusahaan. Biaya tersebut merupakan hasil dari akibat segala kegiatan perusahaan yang bersangkutan yang berkaitan dengan lingkungan. Pada dasarnya akuntansi lingkungan memang berfokus pada biaya pengembangan atau perawatan lingkungan khususnya pada perusahaan atau lembaga yang fokus utama pekerjaan mereka berhubungan dengan lingkungan. (Aldy, 2018)

tujuan akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau yang menggunakannya. Disamping itu, maksud dan tujuan dikembangkan akuntansi lingkungan antara lain meliputi (Nurul, 2016):

1. Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik.

4. Fungsi dan peran Akuntansi Lingkungan

Pentingnya penggunaan akuntansi lingkungan bagi perusahaan atau organisasi lainnya dijelaskan dalam fungsi dan peran akuntansi lingkungan. Fungsi dan peran tersebut dibagi kedalam dua bentuk. Fungsi pertama disebut dengan fungsi internal dan fungsi kedua disebut fungsi eksternal. (Indrawati, 2018). Masing-masing fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Fungsi Internal

Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi ini maupun jasa lainnya. Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan maupun penentuan setiap kebijakan internal perusahaan.

b) Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Informasi yang diungkapkan merupakan hasil yang diukur secara kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan. Termasuk didalamnya adalah informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Fungsi eksternal memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholder, seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi

2.2.4 Biaya Lingkungan

Pengertian Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan merupakan akibat yang timbul dari aktifitas perusahaan yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Definisi biaya lingkungan mencakup dari seluruh biaya-biaya yang paling nyata (seperti limbah buangan). Menurut Hansen dan Mowen (2011) mendefinisikan biaya lingkungan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rusak atau biaya-biaya untuk mencegah terjadinya kerusakan dimasa depan. Biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya kualitas lingkungan. Sama halnya dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2009: 403):

- a) Biaya pencegahan (enviromental prevention costs) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Contoh aktivitas-aktivitas pencegahan adalah evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit resiko lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, serta pemerolehan sertifikat ISO 14001.
- b) Biaya deteksi lingkungan (enviromental detection costs) adalah biaya-biaya untuk aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh aktivitas deteksi lingkungan adalah audit aktivitas

lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran.

c) Biaya kegagalan internal (environmental internal failure cost) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksi limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contoh aktivitas kegagalan internal adalah pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan.

d) Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure costs) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Contoh aktivitas kegagalan eksternal adalah membersihkan tanah yang tercemar, menyelesaikan klaim kecelakaan pribadi (yang berhubungan dengan lingkungan), merestorasi tanah ke keadaan alamiah, hilangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk, menggunakan bahan baku dan listrik secara tidak efisien, menerima perawatan medis karena polusi, hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran, hilangnya manfaat danau sebagai tempat rekreasi, dan rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat

2.2.5 Pengelolaan Limbah

Pengertian limbah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Dalam undang-undang tersebut juga telah

dijelaskan mengenai Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dan pengertian dari limbah B3 itu sendiri yaitu sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Ada pun tata cara dalam pengelolaan limbah B3 yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 100 dan 101.

Pada Pasal 100 yaitu:

- (1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. termal; b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
- (2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. ketersediaan teknologi; dan b. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

Pada Pasal 101 :

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Usaha perbaikan kesehatan masyarakat terus dikembangkan antara lain melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, penyediaan air bersih, penyuluhan kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu dan

anak. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan limbah rumah sakit merupakan bagian dari penyehatan lingkungan di rumah sakit juga mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit serta mencegah infeksi unsur yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah sakit. Pemusnahan limbah medis haruslah dengan menggunakan cara pembakaran, perlu dijaga keutuhan kemasannya pada waktu sampah tersebut ditangani. Banyak sistem pembakaran atau insenerasi yang menggunakan peralatan mekanik. Namun, usahakan untuk melakukan pengolahan limbah medis yang sesuai dengan peraturan berlaku dan pengolahan ramah lingkungan. . (Fika, 2016)

2.2.6 Tahap – Tahap Perlakuan Akuntansi Lingkungan

Menurut Mulyani 2013, pencatatan untuk pengelolaan segala macam yang berkaitan dengan limbah sebuah perusahaan didahului dengan perencanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan riil setiap tahunnya. Pengelompokan dalam tahap analisis Akuntansi lingkungan sebagaimana yang ditentukan dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) antara lain sebagai berikut:

a. Identifikasi

akuntansi manajemen memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengukur penghematan biaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Sehingga manajemen mempunyai informasi untuk mengontrol dan mengendalikan biaya lingkungan demi tercapainya produk yang efisien dan murah (Wahyudi, 2014).

Menurut Suwardjono (2009) mengidentifikasi berarti mengenali suatu objek transaksi dan menentukan apakah objek tersebut telah memenuhi kriteria untuk diukur

dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. kriteria menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK, 2015) bahwa:

1. Merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengolahan limbah seperti biaya bahan bakar dan pelumas serta penyusutan bangunan IPAL menunjukkan adanya penurunan manfaat ekonomi.
2. Berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas. Pengeluaran perusahaan untuk mengolah limbahnya seperti untuk pembelian bahan penolong dan suku cadang maintenance mengakibatkan adanya arus keluar atas kas perusahaan.
3. Mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Investasi perusahaan untuk membuat bangunan IPAL dan membeli mesin boiler mengakibatkan penurunan ekuitas perusahaan.

b. Pengakuan

Merupakan elemen-elemen yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mencegah lingkungan dari pencemaran dapat di akui sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP, 2011), suatu unsur laporan keuangan harus diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan Biaya-biaya untuk membangun IPAL dan pengadaan mesin boiler, serta biaya operasional terkait pengolahan limbah memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dimasa mendatang

2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pos-pos terkait kegiatan pengolahan limbah mempunyai nilai yang diukur dengan menggunakan nilai historis yang dinyatakan dalam rupiah.

c. Pengukuran

perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya - Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai dengan kebutuhan riil setiap periode (Nurul Hidayati, 2016). mengungkapkan bahwa pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai yang berbeda-beda. Menurut Wahyudi, 2014.

Selain itu PSAK 57 mengatur tentang pengukuran seperti pada paragraf 37 yaitu estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Seringkali tidak mungkin dan terlalu mahal bagi entitas untuk menyelesaikan kewajiban atau mengalihkan kewajibannya pada akhir periode pelaporan. Akan tetapi estimasi jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya atau untuk mengalihkan kewajibannya, merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan.

d. Penyajian

Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama sama dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan umum. Penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut. Penyajian informasi mengenai biaya lingkungan telah diatur dalam PSAK No. 1 Tahun 2015, paragraf dua belas (12) yang menyatakan :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”

e. Pengungkapan

Menurut Suwardjono (2009) standar pengungkapan suatu kejadian biasanya menetapkan apakah suatu informasi harus disajikan secara terpisah dari laporan keuangan utama, apakah informasi tersebut digabungkan dengan pos laporan yang lain, atukah perlu dirinci dan lain sebagainya.

Dalam PSAK No.1 paragraf 117 tahun 2015 tentang penyajian laporan keuangan disebutkan bahwa:

“Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan:

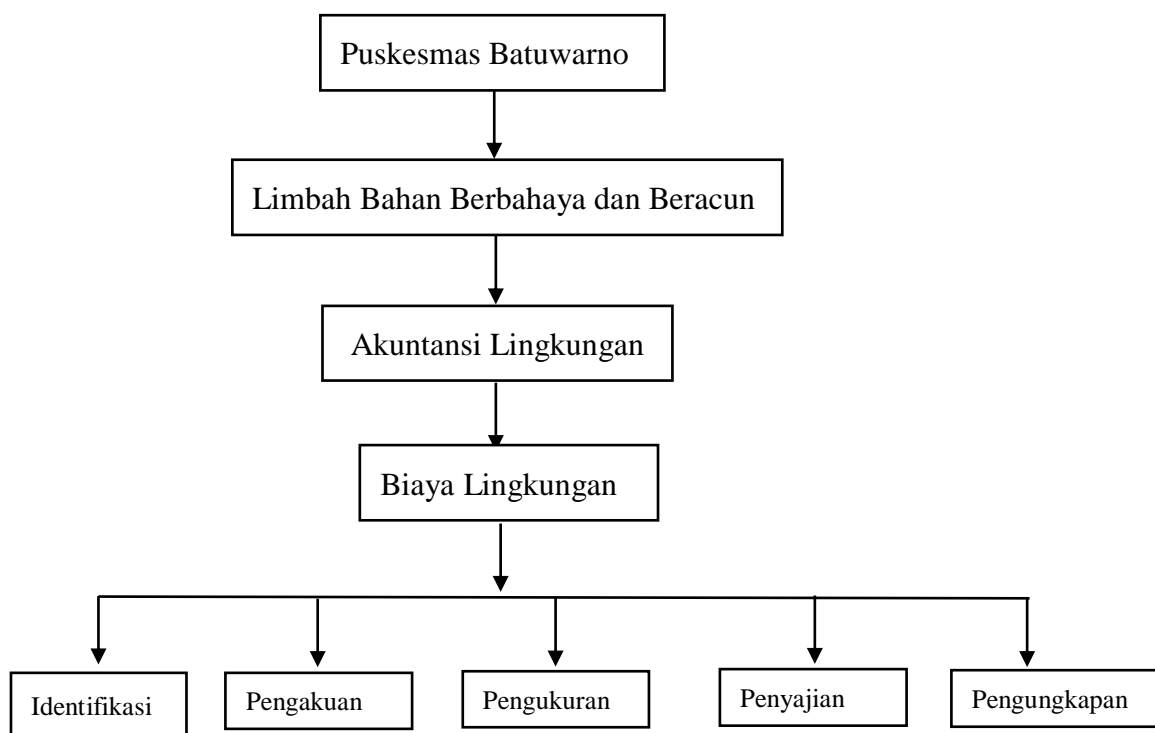
(a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan:

(b) kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan”.

Ditinjau dari tujuan pemberian informasi akuntansi, maka pengungkapan informasi lingkungan adalah perusahaan dengan pemakainya guna pertimbangan ekonomis dan keputusan yang rasional. Berbagai informasi tentang lingkungan baik yang menyangkut

tindakan pengurangan dampak negatif maupun kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktifitas perusahaan dapat disajikan agar informasi benar-benar relevan dan *reliable*. Bentuk pengungkapan informasi lingkungan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan, karena sampai saat ini belum ada standar baku yang mengaturnya (Amalia, 2010).

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 kerangka konseptual

Puskesmas Batuwarno Wonogiri merupakan salah satu pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki limbah B3, dimana jika limbah B3 ini tidak dikelola dengan baik dan benar akan berdampak negatif berupa pencemaran lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Untuk menangani masalah tersebut Puskesmas perlu adanya akuntansi lingkungan atas pengelolaan limbah.

Selama ini belum ada acuan khusus mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan pada suatu perusahaan sehingga setiap perusahaan menerapkan akuntansi lingkungan berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan. Pada PSAP No. 1 Tahun 2010 dijelaskan bahwa perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti penyajian laporan tentang lingkungan hidup termasuk juga biaya pengelolaan limbah di dalamnya. Dalam mengelola limbah tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dan menerapkan perlakuan akuntansi biaya lingkungan dengan tahap-tahap: pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian.